

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Koordinasi Antara Kelompok Tani dan BPD dalam Penyediaan Pupuk**

Distribusi pupuk di desa Fajar Baru ini masih kurang, dan sulit untuk didapat. Untuk mendapatkan pupuk petani harus membuat suatu Kelompok Tani, kemudian setiap Kelompok Tani tersebut mendaftarkan kepada koordinator pupuk yang ada di desa agar mendapatkan bagian pupuk dan dibagikan kepada anggota Kelompok Tani tersebut masing-masing. Jumlah pupuk yang dibutuhkan per kelompok tani per hektar adalah 3 kuintal pupuk. Sedangkan luas lahan pertanian yang dimanfaatkan adalah 200 hektar. Jumlah pupuk yang didapat petani tergantung pada jumlah luas lahan pertanian. Namun jumlah itu pun masih belum mencukupi kebutuhan petani di desa Fajar Baru.

Namun pada pelaksanaannya, para petani bahkan masih sulit mendapatkan pupuk meskipun sudah terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani tersebut. Pendistribusian pupuk dirasakan sangat menyulitkan bagi para petani. Para petani beralih kepada pupuk alami dan organik untuk menggantikan jumlah pupuk kimia yang tidak mencukupi. Seperti permasalahan inilah dibutuhkan partisipasi petani dalam menyampaikan aspirasinya agar pembangunan desa kearah yang lebih baik dapat diwujudkan. Seperti kebutuhan mendasar petani contohnya bibit padi dan pupuk yang merupakan kebutuhan primer.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan fungsi untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa agar dapat terciptanya pembangunan desa. Koordinasi yang dilakukan antara Kelompok tani dan BPD dalam hal penyediaan pupuk. Pupuk yang jarang didapatkan menyulitkan petani untuk meningkatkan hasil pertanian.

Hasil wawancara dengan Heri Supriyanto pada tanggal 15 November 2009

“ ya, saya tahu, soalnya saya petani disini, saya sudah pasti tahu. Masalahnya macam-macam, seperti jika musim kemarau susah untuk mendapatkan pengairan kemudian pupuk yang serba pas, jadi sudah dijatah”.

Hasil wawancara dengan Juhari pada tanggal 26 November 2009

“distribusi pupuk disini memang sudah ada, dan cukup untuk kelompok tani disini. dan setiap kelompok tani sudah mendapatkan jatahnya masing-masing untuk tiap kelompok. Namun pada kenyataannya pupuk disini masih sulit untuk didapatkan, karena jumlah pupuk memang sudah dijatah jadi untuk mendapatkan pupuk lebih tidak bisa. Dan kelompok tani yang lain tidak dapat jadi tidak enak dengan sesama petani yang lain. Sebenarnya lancar-lancar saja tapi jika untuk lebihnya masih kurang juga”

Pernyataan Heri dan Juhari tersebut dapat dimaknai bahwa pupuk masih menjadi masalah yang mendasar bagi petani, dan sulit untuk didapatkan. Hal ini pun dirasakan sama oleh petani lain yang merasa pupuk masih sulit untuk didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa permasalahan pupuk memang masih menjadi permasalahan yang belum bisa dihadapi oleh petani desa dengan baik. Selama koordinasi belum dapat dilakukan maka permasalahan pupuk ini tidak akan terpecahkan. Dan kesejahteraan petani sulit meningkat.

Hasil wawancara dengan Bambang Setio pada tanggal 15 November 2009

“tidak pernah, BPD disini kurang berperan terutama masalah pertaniannya.”

Hasil wawancara dengan Mitro Wiyono pada tanggal 15 November 2009

“ yang saya tahu tidak pernah, sampai saat ini saya belum pernah terlibat dalam aktifitas dengan BPD. Mungkin yang saya tahu BPD lebih mengurus pemerintahan desa saja.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa koordinasi antara kelompok tani dan BPD dalam hal penyediaan pupuk sudah terjadi, namun frekuensi koordinasi masih kurang. Sehingga distribusi pupuk tidak berjalan dengan lancar dan pupuk menjadi sulit untuk didapatkan. Distributor membeli pupuk kepada produsen untuk disampaikan kepada kios pengecer dikecamatan, kemudian masing-masing distributor tidak dibolehkan membeli dalam jumlah yang besar dan hanya diperkenankan membeli pupuk sejumlah kebutuhan di kecamatan yang telah ditentukan, dan pengecer hanya mengambil pupuk dari satu distributor untuk selanjutnya dijual langsung kepada petani.

### **B. Koordinasi Antara Kelompok Tani dan BPD dalam Pembangunan Infrastruktur Desa**

Koordinasi yang dimaksud adalah dalam hal perbaikan infrastruktur desa dan fasilitas umum. Jalan merupakan akses penting untuk distribusi hasil pertanian. Semakin cepat pendistribusian hasil pertanian semakin cepat juga hasil yang didapatkan. Kemudian fasilitas umum seperti irigasi untuk pertanian dan kehidupan sehari-hari memang belum ada, masyarakat petani masih menggunakan sungai.

Hal yang penting sebenarnya adalah sejauh mana masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan di wilayahnya. Rasa memiliki akan terbangun ketika aspirasi yang mereka sampaikan terakomodir. Salah satu usulan masyarakat desa yang diakomodir adalah peningkatan sarana jalan berupa pengerasan jalan, sementara

usulan kegiatan penting lainnya yang terkait dengan pendidikan belum dapat terealisasi.

Jalan desa Fajar Baru yang rusak juga adalah salah satu dari sekian banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat khususnya petani, karena distribusi hasil pertanian akan menjadi terhambat dan akan merugikan petani. Kemudian seperti sulitnya distribusi pupuk kepada petani yang sulit, hal ini akan menyulitkan petani mendapatkan hasil pertanian yang baik. Untuk mengatasi kendala tersebut, koordinasi petani dan BPD dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi petani pada khususnya. Sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah saja dan kemakmuran dapat terwujud. Panjang jalan utama di desa Fajar Baru ini adalah sekitar 5 Km. Dan rata-rata sudah banyak yang berlubang.

Banyak daerah yang berpotensi besar dalam pertanian yang belum beruntung memiliki akses jalan raya yang layak. Desa ini memiliki potensi yang besar di sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Hamparan yang selalu ditanam masyarakatnya memberi kontribusi yang besar dalam penyediaan pangan. Sayangnya akses jalan menuju ke desa ini sangat memprihatinkan.

Hasil wawancara dengan Mitro Wiyono pada tanggal 15 November 2009

“masalah pupuk yang serba pas-pasan. Kemudian air untuk kesawah kalau tidak pada musim hujan sulit sekali untuk mendapatkannya.”

Hasil wawancara dengan Wagiman pada tanggal 17 November 2009

“Pupuk itu dengan irigasi sumber airnya sedikit, jadi susah kalau tidak ada air, padinya tidak hidup”.

Hasil wawancara dengan Juhari tanggal 26 november 2009

“...irigasi desa ini ada yang kebagian yaitu desa yang berada disebelah kanan masuk ini memang dilewati sungai, tapi kalo yang sebelah kiri tidak dilalui, jadi mengandalkan air sumur galian, dan mengandalkan air hujan.jika ingin membuat sumur bor membutuhkan biaya yang cukup banyak”.

Koordinasi dalam perbaikan infrastruktur antara kelompok tani dan BPD dalam bidang perbaikan infrastruktur terjadi, namun frekuensi pertemuan koordinasi masih kurang baik karena petani merasa tidak memiliki kepentingan didalam perbaikan infrastruktur desa seperti jalan dan perbaikan irigasi.

Kondisi ini tentu saja mempengaruhi banyak hal. Khususnya terhadap pertanian, kondisi ini menyebabkan biaya tambahan untuk pengangkutan sarana produksi dan juga untuk pengangkutan hasil produksi ke luar. Di sisi lain harga jual produk pertanian mereka sama dengan harga pasar umumnya dan tidak mungkin dinaikkan karena pasti tidak akan dibeli.

### **C. Koordinasi Antara Kelompok Tani dan BPD dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Upaya peningkatan pendapatan petani tersebut dilakukan dengan memberdayakan petani melalui mobilisasi kelompok dan perencanaan desa, pengembangan kelembagaan, dan dapat berpartisipasi dalam menentukan sarana dan prasarana desa yang dibutuhkan disertai dukungan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan terutama pada lahan-lahan marjinal serta memberikan akses yang luas kepada petani terutama dalam bidang informasi.

Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian dalam upaya peningkatan ketahanan pangan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup petani.

Sudah sejak lama pemerintah berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat petani yang merupakan porsi terbesar dari struktur masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk program telah diterapkan untuk membantu petani agar mampu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam perekonomian. Berbagai bantuan juga telah dilaksanakan mulai dari subsidi sarana produksi, bantuan modal langsung, kredit usaha tani, dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat beragam. Namun hasilnya petani masih berpendapatan rendah, masih tergantung terhadap berbagai bantuan, dan masih selalu berfikir belum mampu bergerak sendiri dalam melaksanakan usaha taninya.

Hasil wawancara dengan Bambang Setio pada tanggal 15 November 2009

“ya kami berharap BPD dapat memperhatikan nasib petani disini”

Hasil wawancara dengan Heri Supriyanto pada tanggal 15 November

“harapan saya BPD dapat membantu kami petani fajar baru dalam menyelesaikan masalah pertanian didesa ini”

Dari hasil wawancara diatas kita bisa menyimpulkan bahwa koordinasi antara kelompok tani dan BPD dalam hal peningkatan kesejahteraan petani belum terjadi. Karena masyarakat khususnya petani desa ini masih banyak mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dari instansi pemerintah desa khususnya BPD. Bantuan yang dibutuhkan petani seperti pengadaan alat untuk distribusi air sungai atau air sumur, alat bajak sawah berupa mesin traktor dan mesin penggilingan padi sehingga dapat menghemat biaya ongkos produksi hasil pertanian.

#### **D. Koordinasi Petani dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa**

Koordinasi yang terjadi antara Petani dan BPD masih belum terjadi secara rutin. Frekuensi pertemuan masih jarang dilakukan. Hal ini dapat menghambat kemajuan desa yang akan menyebabkan tidak terjadinya pembangunan desa Fajar Baru.

Musyawarah di Fajar Baru ini memang sering dilakukan setiap bulannya, namun hanya pada bidang pemerintahan desa. Membahas seperti mengenai bidang administrasi desa saja. Untuk bidang pertanian belum pernah dilakukan secara terprogram dan belum ada agenda rutin pertemuan untuk membahas masalah pertanian.

Dalam proses pembangunan desa tahap pertama yang harus adalah tahap perencanaan. Proses perencanaan pembangunan desa harus dilakukan oleh unsur pemerintah dan unsur BPD agar perencanaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Seperti petani, apa sajakah yang dibutuhkan untuk menunjang pertanian didesa tersebut, karena semua itu membutuhkan perencanaan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, BPD, dan masyarakat khususnya petani harus berkoordinasi guna menunjang proses perencanaan.

##### **1. Adanya Pertemuan**

Koordinasi antara Petani dan BPD dapat diketahui berjalan dengan baik atau tidak diawali dengan pendapat informan tentang salah satu indikator koordinasi, yaitu komunikasi. Adanya komunikasi antara Petani dengan BPD merupakan indikator yang sangat penting.

wawancara dengan Bambang Setio, pada 15 November 2009

“tidak pernah, BPD disini kurang berperan terutama masalah pertaniannya.”

Wawancara dengan Johari, pada tanggal 26 November 2009

“ kalau BPD membahas tentang pertanian benar, memang belum. Tapi kalau di tingkat intern masing-masing kalau di tingkat petani, katakanlah mengadakan pertemuan melalui kelompok tani.”

Berdasarkan jawaban hasil wawancara diatas, diketahui bahwa petani merasa belum pernah melakukan pertemuan secara formal, atau terprogram. Hanya mengadakan pertemuan dengan sesama kelompok tani. Hal tersebut juga dikatakan oleh ketua BPD.

Kurangnya perhatian BPD pada khususnya terhadap petani dalam menyelesaikan masalah pertanian menghambat produksi hasil pertanian, walaupun petani bisa mengatasi sendiri masalah yang terjadi. Sebab BPD memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Saat ini BPD kurang memfasilitasi untuk mengadakan pertemuan antara Petani dengan pemerintahan desa dalam tujuan untuk pembangunan desa.

## **2. Frekuensi Pertemuan**

Suatu koordinasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila terdapat kontak langsung yang berkesinambungan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan fungsional. Frekuensi pertemuan tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan dalam melakukan kegiatan sebuah organisasi.

wawancara dengan Bambang Setio, pada tanggal 15 November 2009.

“Jarang sekali, kami sibuk bekerja ke sawah jadi kalau mau pertemuan susah sekali”.

Wawancara dengan Johari, pada tanggal 26 November 2009

“Belum pernah secara formal”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa frekuensi pertemuan antara kelompok tani dan BPD sangat jarang dilakukan. Pertemuannya tidak secara rutin, yang artinya sulit sekali ditentukan atau tidak pernah sama sekali.

Pertemuan antara Kelompok tani dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak direncanakan, yaitu pada saat Kelompok tani dan BPD bertemu dilokasi tempat bekerja atau setelah bekerja saja. Tentu saja hal tersebut tidak mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara Kelompok tani dan BPD dalam pembangunan desa.

## **E. Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi**

Faktor-faktor penghambat koordinasi antara Kelompok Tani dan BPD dalam pembangunan desa adalah:

### **1. Perbedaan Orientasi Tujuan**

Perbedaan orientasi ini adalah perbedaan tentang cara yang paling baik untuk mengembangkan organisasi yaitu Kelompok tani dan BPD. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda proses koordinasi. Tujuan koordinasi ini adalah membangun pertanian desa guna menunjang pembangunan desa tetapi selain tujuan mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan yaitu mengembangkan bidang masing-masing.

Wawancara dengan Bpk. Bambang Setio, pada tanggal 15 November 2009

“belum ada, karena itu tadi, lebih mengurus pemerintahan desa.”

Wawancara dengan Bpk. Juhari pada tanggal 26 November 2009

“ kalau ditingkat BPD sendiri, masalah pemerintahan desa sangat-sangat sering dilakukan pertemuan, tapi kalau yang membahas pertanian langsung secara khusus memang belum.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat masalah koordinasi yang pertama adalah mengenai perbedaan orientasi tujuan. Kelompok Tani mempunyai tujuan sendiri dalam proses koordinasi, yaitu mengembangkan pertanian di Desa Fajar Baru. Sedangkan BPD mempunyai tujuan yang berbeda. Masing masing Kelompok Tani dan BPD ini mempunyai tujuan dan cara yang berbeda dalam mencapai tujuannya masing-masing karena mereka mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda juga.

## **2. Perbedaan Dalam Orientasi Waktu**

Perbedaan ini adalah perbedaan dalam memprioritaskan masalah-masalah yang dapat ditanggulangi segera dengan memprioritaskan masalah-masalah yang membutuhkan waktu yang lama. Kelompok Tani mempunyai prioritas pekerjaan masing-masing. Prioritas masalah utamanya dalam koordinasi adalah mengenai masalah pertanian secara keseluruhan, tetapi ada prioritas masalah masing-masing di luar proses koordinasi. Prioritas BPD adalah mengenai pembangunan desa yang berhubungan dengan pemerintahan desa.

Wawancara dengan Bpk. Bambang Setio, Ketua Gapoktan Fajar Baru. Pada tanggal 15 November 2009

“Jarang sekali, Kami sibuk ke sawah, jadi kalau mau ada pertemuan susah sekali.”

Wawancara dengan Bpk. Juhari Ketua BPD Fajar Baru pada tanggal 26 November 2009

“Memang sudah di agendakan, dalam setiap 3 bulan sekali paling minim. Selain itu kalau ada masalah kelompok tani biasanya konsultasi kepada PPL bukan kepada BPD.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka ditemukan masalah koordinasi antara Kelompok Tani dan BPD yaitu kurangnya komunikasi antara Kelompok tani dan BPD menyebabkan koordinasi kedua belah pihak menjadi sulit untuk dilaksanakan, dan pembangunan menjadi terhambat. Karena tiga bulan merupakan waktu yang cukup lama dan efisiensi penggunaan waktu menjadi tidak digunakan dengan baik.

### **3. Perbedaan Dalam Orientasi Pribadi**

Perbedaan ini adalah perbedaan cara-cara komunikasi berlangsung cepat dengan komunikasi yang berlangsung secara lambat. Komunikasi kerja Kelompok Tani dan BPD sangat berbeda. Masing-masing bidang mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda, ada yang mengkomunikasikan pekerjaannya dengan cepat dan ada juga yang sangat lambat dalam mengkomunikasikan pekerjaannya. Dalam subunit-subunit tertentu, cara-cara komunikasi berlangsung cepat, sedangkan dalam subunit-subunit yang lain berlangsung secara lambat. Contohnya seperti pada sesama petani komunikasi berlangsung cepat, sedangkan dengan BPD tidak, dan begitu juga dengan sesama BPD, komunikasi berlangsung cepat. Namun tidak kepada kelompok tani.

wawancara dengan Bambang Setio, pada tanggal 15 November 2009

“ tidak pernah, karena BPD lebih mengurus kepada pemerintah desa saja. Jadi kalau kami ada masalah langsung bertanya kepada BPP.”

wawancara dengan Heri Supriyanto, pada tanggal 15 November 2009

“ yang saya tau tidak pernah. Sampai saat ini saya belum pernah terlibat kegiatan dengan BPD, mungkin BPD lebih mengurus ke pemerintahan desa saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka faktor penghambat koordinasi yang lainnya adalah perbedaan dalam orientasi pribadi, yaitu perbedaan cara komunikasi yang cepat dan komunikasi yang lambat. Koordinasi yang terjadi antara dua instansi ini terkadang bisa berlangsung secara lambat. Hal ini wajar saja terjadi karena koordinasi ini melibatkan banyak orang dengan dua instansi yang berbeda, yang mempunyai cara-cara komunikasi yang berbeda pula dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

#### **F. Penyelesaian Masalah Koordinasi**

Hasil wawancara dengan Bambang Setio pada tanggal 15 November 2009

“ tidak pernah, karena BPD lebih mengurus kepada pemerintahan desa saja. Jadi kalau kami ada masalah langsung bertanya kepada Badan Penyuluh Pertanian.”

Hasil wawancara dengan Heri Supriyanto pada tanggal 15 November 2009

“ yang saya tau tidak pernah. Sampai saat ini saya belum pernah terlibat kegiatan dengan BPD, mungkin BPD lebih mengurus ke pemerintahan desa saja.”

Selama ini tidak pernah ada cara ataupun solusi untuk mengatasi masalah koordinasi antara Kelompok Tani dan Badan Permusyawaratan Desa Fajar Baru. Masing-masing kelompok hanya melakukan, tugas masing-masing sesuai kewenangannya, walaupun ada permasalahan dari Kelompok Tani maka petani berkoordinasi dengan Badan Penyuluh Pertanian untuk mengatasinya. BPD lebih mengurus masalah yang berhubungan dengan pemerintahan desa.